



Media: Merapi

Hari: Selasa

Tanggal: 25 Januari 2011

Halaman: 28

Keringanan pajak bagi pemilik bangunan heritage.

Yulianingsih

Banyak predikat yang melekat di belakang nama Kota Yogyakarta. Bukan hanya sebagai kota pendidikan semata, tetapi juga kota perjuangan, kota budaya dan kota pariwisata. Sebagai kota perjuangan dan kota budaya, Yogyakarta memiliki banyak sejarah yang banyak andil dalam pembentukan dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini. Hal itu tidak hanya bisa dilihat dari cerita sejarah yang ada berdasarkan penurunan pelaku, tetapi bisa dilihat dari peninggalan sejarah perjuangan nenek moyang di kota ini.

Sebagai kota budaya, Yogyakarta merupakan kota yang usainya lebih tua dibandingkan dengan berdirinya NKRI. Peninggalan nenek moyang masyarakat Yogyakarta masih banyak terdapat di kota ini.

Peninggalan warisan budaya itu sekarang bisa dilihat dari bangunan cagar budaya (BCB) seperti stasiun Tugu Yogyakarta, Gedung Budi Utomo, Benteng Vredeburg, dan lain-lain; situs warisan budaya yaitu Candi Prambanan, Candi Borobudur, Candi Ijo; dan kawasan cagar budaya di Kota Yogyakarta seperti di Kotabaru, Kotagede dan Sagan. Keberadaan warisan budaya *heritage* di Kota Yogyakarta ini bisa dibilang paling banyak dibandingkan wilayah lain di Provinsi DIY.

Warisan budaya saat ini telah menjadi magnet pariwisata tersendiri bagi kota wisata ini. Menyadari akan banyaknya warisan budaya tersebut Pemkot Yogyakarta berupaya keras melestarikannya. Beberapa kebijakan dikeluarkan Pemkot setempat sebagai tindak lanjut dari upaya itu.

Salah satunya adalah, keringanan pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi pemilik atau pengguna BCB dan warisan budaya di Yogyakarta. Kebijakan lain adalah subsidi dana pemeliharaan BCB tersebut. "Apapun langkah pemerintah jika masyarakat tidak menyadari akan pentingnya warisan budaya, maka akan sia-sia. Karenanya yang paling utama itu adalah kesadaran masyarakat akan

arti penting, dan tingginya nilai warisan budaya itu," terang Wali Kota Yogyakarta, Herry Zudianto, awal pekan lalu. Diakuinya, penangan warisan budaya ini dikoordinasikan langsung Pemrov DIY. Karenanya harus ada sinergi penanganan yang komprehensif antara kabupaten/kota di Provinsi DIY.

Keringanan PBB

Sejak tahun 2009 lalu, Pemkot Yogyakarta memberikan keringanan pajak bumi dan bangunan (PBB) terhadap bangunan warisan budaya (BWB), yaitu bangunan yang sudah masuk BCB maupun yang belum ditetapkan tetapi masuk warisan budaya. Keringanan PBB tersebut didasarkan atas hasil penilaian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Yogyakarta sendiri yang dilandasi atas nilai bangunan dan sejarahnya.

Menurut Wisnu Budi Irianto, Kepala Bidang Pajak Dinas Pajak dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPDPK) Kota Yogyakarta, pengurangan PBB tersebut didasarkan atas Keputusan Walikota tanggal 18 Mei 2009 nomor 647/359 tentang pemberian insentif dan pengurangan pajak bagi BWB. Dari 437 bangunan warisan budaya yang telah ditetapkan Disparbud Kota Yogyakarta, diputuskan hanya 295 BWB yang akan diberikan insentif.

Pasalnya, kata dia, 142 BWB lainnya telah dibebaskan dari pajak sejak dulu. "Seperti sekolah, keraton, dan perkantoran itu tidak akan diberikan insentif. Karena sudah dibebaskan pajaknya," katanya.

Besaran insentif yang akan diberikan kepada pemilik BWB bervariasi. Tergantung hasil penilaian yang didasarkan nilai *heritage*, lokasi bangunan, pemanfaatan bangunan dan ketetapan pajak. Semakin nilai budaya yang dikandung dalam suatu bangunan tinggi, lokasinya berada di tepi jalan protokol, dan pemanfaatannya untuk rumah tangga, maka insentif yang diterima pun akan besar.

Ketetapan pajak BWB juga mempengaruhi besaran insentif yang diterima. Bagi BWB yang ketetapan pajaknya kurang dari Rp 50.000 maka insentif yang diberikan sebesar 90 persen. Sementara yang di atas Rp 50.000, besaran insentif maksimal hanya 15 persen dari PBB yang dibayarkan. "Misalnya, Hotel Inna Garuda dan Phoenix, insentifnya bisa mencapai Rp 20 juta," kata Wisnu. Tahun 2010 lalu pihaknya menganggarkan dana Rp 500 juta untuk hal ini melalui APBD setempat.

Wakil Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan, Yogyakarta telah masuk dalam kota tua bersejarah. Karenanya kata dia, menjadi suatu kewajiban bagi suatu kota yang memiliki banyak cagar budaya untuk menjaganya dengan baik. Selain itu, kata dia setiap karya budaya jangan pernah diremehkan baik itu kesenian, bangunan, pakaian adat dan kuliner. "Jika suatu keunikan dijaga dan dihargai dengan layak, maka akan lestari dan memperkaya budaya daerah," tandasnya. ■ ed: heri purwata

Tindak Lanjut

Untuk ditanggapi

Untuk diketahui

Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo			

Yogyakarta, 26 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005